

MRT Jakarta Pasang Ratusan LED untuk Tingkatkan Pendapatan Non Tiket

JAKARTA (IM) - PT MRT Jakarta (Perseroda) telah memasang 438 pilar "neonbox" dan 50 pilar "light emitting diode" (LED) yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan non tiket dari pemasangan iklan oleh mitranya.

"Salah satu kegiatan non-farebox kita di tengah pandemi yang sudah berjalan, yaitu initiative advertising. Kita sekarang memanfaatkan pilar sepanjang koridor MRT Jakarta," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), William Sabandar dalam forum diskusi virtual di Jakarta, Kamis (10/12).

Ia mengatakan saat ini pemasaran digital yang digagas MRT Jakarta berada di sepanjang lintasan layang dari Stasiun Lebak Bulus Grab hingga Stasiun ASEAN.

"Ada sejumlah 438 pilar 'neonbox' dan 50 pilar LED yang dipasang mulai dari Stasiun MRT Lebak Bulus sampai ASEAN. Nantinya

juga dipasang di sekitar Depo Lebak Bulus," ujar William.

Akibat adanya pandemi Covid-19, MRT Jakarta mencari inovasi untuk bisnisnya agar tidak hanya bergantung pada pendapatan penjualan tiket (farebox). Pemasangan media untuk memutar iklan secara digital pun menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan MRT Jakarta untuk menghasilkan pendapatan di luar penjualan tiket.

William mengatakan dengan adanya pendapatan non tiket maka saat ini MRT Jakarta dapat terbantu dari segi ekonomi meski turut terimbas Covid-19.

Beberapa kegiatan untuk mendapatkan penghasilan di luar penjualan tiket yang dikembangkan MRT Jakarta di antaranya menyiapkan penyewaan ruang untuk kerja bersama (coworking space) hingga menyiapkan pengembangan kawasan berbasis transit (Transit Oriented Development/TOD). ● osm

Babinsa Bersama Tiga Pilar Gelar Operasi Yustisi di Jalan Mangga Besar



JAKARTA (IM) - Babinsa Kelurahan Mangga Dua Selatan Serda Heru bersama Tiga Pilar melaksanakan Operasi Yustisi Tertib Masker di wilayah binaan.

Kegiatan yang berlangsung di sepanjang jalan Mangga Besar 13 Pangeran Jayakarta Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar Jakarta pusat dilakukan berdasarkan Perhubungan Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat.

Adapun tujuan digelar operasi yustisi untuk menertibkan warga masyarakat mematuhi protokol kesehatan, terutama penerapan 3M, memutus rantai penularan virus corona.

"Pengawasan terhadap protokol kesehatan di masyarakat harus terus diawasi

secara ketat. Sebab, upaya ini merupakan langkah strategis meminimalisir bahkan memutus kasus penularan covid 19", tutur Serda Heru menjelaskan.

Serda Heru juga mengungkapkan, operasi menjerang 11 warga masyarakat. "Terjaring 11 warga pelanggaran protokol kesehatan. Mereka tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Selanjutnya, kesebelas warga tersebut dikenakan sanksi. 6 Orang sanksi sosial dan 5 Orang saksi teguran.

Operasi yang berlangsung kondusif itu melibatkan personel Babinsa Kelurahan Mangga Dua Selatan, Babinkamtibmas, Pasukan BKO Kodim Jakarta Pusat, personel Koarmada I serta Satpol PP.

● tom

Kadin DKI Jakarta Siap Kolaborasi untuk Pemulihan Ekonomi

JAKARTA (IM) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta turut mendorong pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya di Jakarta. Adapun hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kadin.

"Kadin sebagai wadah dari Pengusaha Indonesia didirikan salah satunya adalah untuk dapat menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam pembangunan nasional/daerah. Untuk itu Kadin harus dapat berperan dalam perbaikan iklim dunia usaha pasca pandemi Covid-19," ujar Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi dalam keterangan tertulis, Kamis (10/12).

Dalam acara Musyawarah Kota (MUKOTA) VI/2020 KADIN Kota Jakarta Utara di Hotel Sunlake, Jakarta Utara, Diana menjelaskan Kadin DKI Jakarta dan Kadin Kota se-DKI Jakarta terus berkomitmen untuk selalu berpihak pada pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta.

Menurutnya, saat ini UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional setelah terdampak pandemi Covid-19.

Oleh karena itu Diana mengharapkan kolaborasi bersama berbagai sektor untuk mendukung kebangkitan UMKM.

"Dalam hal ini, sektor bisnis mempunyai kemampuan untuk mencari solusi melalui teknologi, inovasi dan investasi. Kadin siap untuk dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan un-

tuk dapat meningkatkan perekonomian di Jakarta yang sudah mulai menggeliat," pungkasnya.

Sebagai informasi, MUKOTA VI/2020 Kadin Kota Jakarta Utara mengambil tema 'Kadin Kota Jakarta Utara Bersinergi Mendukung Program Kadin DKI Jakarta untuk Membedayakan UMKM di Era Pandemi Covid-19 Bersama Pemprov DKI Jakarta'.

Adapun untuk subtema MUKOTA VI/2020 Kadin Kota Jakarta Utara, yakni 'Bersama Pemkot Jakarta Utara dan Instansi Pelabuhan Tanjung Priok, Kadin Kota Jakarta Utara Mendukung Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Untuk Menciptakan Suasana Usaha Yang Kondusif'.

Lebih lanjut Diana mengatakan di tengah pandemi, MUKOTA diadakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Walaupun harus dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, Musyawarah Kota (MUKOTA) VI/2020 Kadin Kota Jakarta Utara tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19," jelasnya.

Ke depan, lanjut Diana, Kadin DKI Jakarta juga akan menggelar MUKOTA yang dihadiri oleh seluruh Kadin se-DKI Jakarta. Untuk Kadin Kota Jakarta Barat akan digelar 16 Desember 2020 di Aston Kartika Hotel. Sedangkan Kadin Kota Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan akan menggelar MUKOTA pada bulan Februari 2021.

"Untuk itu kami harapkan keterlibatan dari seluruh anggota Kadin DKI Jakarta untuk dapat menyelesaikan acara tersebut," katanya. ● osm

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PROGRES PEMBANGUNAN FLYOVER CAKUNG

Foto udara pembangunan jalan layang (flyover) Cakung, Jakarta Timur, Kamis (10/12). Menurut data Dinas Bina Marga DKI Jakarta proses pembangunan flyover sepanjang 760 meter dengan lebar 18 meter tersebut sudah mencapai 93,5 persen dan ditargetkan dapat digunakan masyarakat pada Januari 2021.

Perayaan Tahun Baru Dilarang, DPRD DKI: Sebaiknya di Rumah Saja

Tim satuan tugas penanganan Covid-19 internal yang berada pada usaha hotel dan restoran diminta untuk melaksanakan tugas pengawasan serta menjamin tidak terjadinya kerumunan dan mendisiplinkan tamu atau pengunjung terhadap protokol kesehatan Covid-19.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menyambut baik adanya larangan perayaan pergantian tahun baru oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan

Polda Metro Jaya. Menurutnya, apabila tetap dibolehkan maka akan banyak kerumunan yang mempermudah penularan Covid-19.

"Karena kondisi Covid kan

enggak boleh ada kerumunan, rayakan di rumah masing-masing saja. Sebaiknya di rumah juga jaga jarak dan habiskan waktu liburan bersama keluarga," ujar Taufik di Jakarta, Kamis (10/12).

Sebelumnya diberitakan, melalui surat edaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 900/SE./2020 tentang Tertib Operasional Tempat Usaha Pariwisata Pada Malam Pergantian Tahun Baru 2020/2021 sesuai dengan pembatasan sosial berskala besar masa transisi di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Parekrif

DKI bersama Polda Metro Jaya setelah rapat koordinasi, melarang adanya perayaan pergantian tahun di hotel maupun tempat wisata.

"Tidak diperkenankan untuk melakukan perayaan kegiatan malam tahun baru 2020-2021 yang berpotensi menciptakan kerumunan atau keramaian pada kegiatan masing-masing," kata Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya.

Kegiatan operasional usaha pariwisata yang dinyatakan boleh beroperasi diminta untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ia menambahkan, tim satuan tugas penanganan Covid-19 internal yang berada pada usaha hotel dan restoran diminta untuk melaksanakan tugas pengawasan serta menjamin tidak terjadinya kerumunan dan mendisiplinkan tamu atau pengunjung terhadap protokol kesehatan Covid-19.

"Seluruh usaha pariwisata diminta mentaati ketentuan jam operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindak tegas sesuai ketentuan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan," tegasnya. ● ber

Anggota DPRD Apresiasi Ganti Untung Terdampak Proyek JIS

JAKARTA (IM) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai positif program pemukiman kembali atau "Resettlement Action Plan" (RAP) bagi warga terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Sekretaris Komisi D (Bidang Pembangunan), Syarif bahkan menilai program ganti untung ini yang memiliki besaran beragam disesuaikan dengan luas bangunan dan jenisnya.

"Ini cara yang beradab dan modern dalam menyelesaikan perselisihan pendapat dan perbedaan cara pandang mengenai lahan tersebut, dari Penda DKI mau pakai tanah dengan warga menduduki di atasnya," kata Syarif.

"Ini juga sangat bagus, biar tidak ada gejolak," tuturnya. Politisi Gerindra ini menyebutkan, sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang juga menjadi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, harus diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir pada Agustus 2022 mendatang.

"Karenanya kami mendukung penuh penyelesaian stadion dan jangan mengecewakan pecinta bola yang jumlahnya jutaan di Jakarta ini yang menginginkan adanya stadion," ujarnya, kemarin.

Jakarta International Stadium (JIS) merupakan proyek

revitalisasi Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW) yang merupakan proyek strategis daerah Pemprov DKI Jakarta dengan harapan menjadi salah satu ikon di Ibu Kota yang ditargetkan selesai pada 31 Oktober 2021.

Jakpro sebagai pemilik proyek JIS bekerja sama dengan tiga perusahaan untuk seluruh pekerjaan terkait desain dan pembangunan termasuk pekerjaan struktur. Pekerjaan itu dalam bentuk kerja sama operasional (KSO) bersama Wijaya Karya (Wika), Jaya Konstruksi dan PT Pembangunan Perumahan (PP).

Jakpro menerapkan "Resettlement Action Plan" (RAP) atau rencana aksi pemukiman kembali dalam pembangunan JIS di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Penerapan RAP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional.

Dalam aturan itu dijelaskan penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan nasional.

Tercatat sebanyak 604 Kepala Keluarga (KK) atau 1.612 jiwa warga dari tiga blok permukiman yakni Blok A1, A2

dan A3 di Kampung Bayam terkena dampak pada proyek pembangunan JIS di atas lahan pemerintah itu.

Program RAP merupakan bentuk kepedulian pemilik proyek yakni Jakpro terkait pentingnya kesejahteraan warga terkena dampak untuk ikut merasakan sisi positif dari pembangunan proyek pemerintah tersebut.

Dalam pelaksanaan program itu, Jakpro dibantu oleh PT Deira Sygisindo dan KJPP Anas Karim Rivai dan rekan. Pelibatan itu untuk menjalankan tata cara pelaksanaan program yang adil dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ganti untung ini diberikan kepada mereka dengan besaran nilai bervariasi berdasarkan penilaian yang dilakukan tim independen. Kriteria itu yakni biaya pembersihan segala sesuatu di atas tanah atau pembongkaran bangunan, biaya mobilisasi, tunjangan sewa selama 12 bulan, dan tunjangan kehilangan pemanfaatan atas kehilangan tanah atau kehilangan pekerjaan jika ada usaha di atas tanah tersebut.

Paling kecil masyarakat mendapat Rp 4,5 juta dan paling besar Rp 110 juta. Waktu pelaksanaan program RAP cukup panjang dimulai sejak September 2019 dan ditargetkan penyelesaian program itu paling cepat akhir Oktober 2020, atau selambat-lambatnya akhir Desember 2020. ● han

27 Warga Terjaring Operasi Yustisi di Tanah Abang

JAKARTA (IM) - Aparat gabungan Tiga Pilar Kelurahan Kebon Kacang melaksanakan Operasi Yustisi, dalam rangka penertiban masker, di Jalan KH.Mas Mansyur RW 07 Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (10/12).

Kegiatan ini sebagai langkah antisipasi dalam mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19, dari wilayah binaan.

Operasi ini dilakukan oleh Babinsa Koramil 05/TA dipimpin Serma Syaparuddin, Lurah Kebon Kacang, Satpol PP dipimpin Ori Sumantri, FKDM Firman, LMK Andi.

Pada kesempatan ini aparat gabungan berhasil menjerang warga yang masih membandel melanggar protokol kesehatan.

"Sebanyak 27 orang war-

ga terjaring tidak memakai masker dan dikenakan sanksi sosial," ujar Serma Syaparuddin.

Selain Operasi Yustisi, petugas gabungan juga mengimbau warga untuk selalu tertib menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak untuk melindungi diri dan warga yang lain. ● tom



FOTO: RISTON LUBIS



TUNTUT BANTUAN COVID-19

Guru honor se-Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (10/12). Dalam spanduk yang dibentangkan, mereka menuliskan, 'Turut Berduka Cita' atas matinya nurani Pemerintah Kabupaten Bekasi yang lebih mementingkan MCK dan Pagar dari pada memberi bantuan kepada guru honorer di masa pandemi Covid-19. Foto diambil, Kamis 10 Desember 2020.

PK Ditolak, MA Wajibkan Anies Terbitkan Izin Reklamasi Pulau G

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terhadap izin reklamasi Pulau G Jakarta Utara.

Alhasil, izin itu harus diterbitkan Anies Baswedan.

Hal ini berdasarkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.

Adapun, putusan tersebut diputuskan 26 November 2020 dengan panitera pengganti Retno Nawangsih. Lalu hakim Yodi Martono Wahyuni, Hadi Dajtmiko, dan Supandi.

"Amar putusan tolak PK," demikian bunyi putusan yang dikutip dari laman MA, Kamis (10/12).

Dengan ditolaknya PK tersebut, maka kembali pada keputusan PTUN sebelumnya, agar Anies Baswedan selaku Gubernur DKI menerbitkan izin reklamasi tersebut.

Awal Perkara

Awalnya, PT Muara Wisesa Samudera menggugat Anies karena tidak menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 16 Maret 2020.

Majelis hakim PTUN pada 30 April 2020 mengabulkan gugatan PT Muara Wisesa

Samudra itu. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Muhammad Ilham pada 30 April 2020.

"Mewajibkan kepada terdohon (Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan keputusan perpanjangan izin reklamasi pantai bersama sesuai permohonan pemohon tertanggal 27 November 2019," tulis hasil putusan yang dikutip Liputan6.com, Rabu (13/5/2020).

Sementara itu, Pulau G merupakan satu dari empat pulau reklamasi yang izinnya tidak dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Izin reklamasi Pulau G tidak dicabut karena pulau itu sudah terlanjur dibangun.

Rencananya, empat pulau yang sudah dibangun yakni Pulau C, D, G dan N, akan diatur tata ruang dan pengelolannya sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Sedangkan pada tahun 2018, Anies mencabut izin prinsip pulau reklamasi di Teluk Jakarta sehingga 13 pulau yang belum dibangun dihentikan pengerjaannya.

Menurut Anies pencabutan itu dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP) Pantura.

Dengan keputusan tersebut, 13 pulau reklamasi yang belum dibangun akan dihentikan pengerjaannya. ● osm